

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI*

# **Buletin APBN**

Vol. V, Edisi 02, Maret 2020

## **Problematika BUMDes Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa**

p. 3

## **Implementasi Mandat Penurunan Harga Gas Bumi Untuk Industri**

p. 8

## **Tragedi Covid-19 Akan Menggoyang Pendapatan Negara 2020?**

p. 12

ISO 9001:2015  
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

# Dewan Redaksi

## Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,  
M.Si.

## Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

## Redaktur

Dwi Resti Pratiwi  
Ratna Christianingrum  
Martha Carolina  
Adhi Prasetyo SW.

## Editor

Ade Nurul Aida  
Marihot Nasution

## Problematika BUMDes Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa

p.3

*SEIRING meningkatnya alokasi Dana Desa, meningkat pula pendirian BUMDes di Indonesia. Namun dari 45.887 BUMDes yang berdiri, masih banyak pula BUMDes yang tidak beroperasi dan belum berkontribusi optimal untuk perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti pemetaan potensi dan pemilihan jenis usaha belum tepat, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), maupun dukungan pemerintah daerah (pemda) yang belum optimal.*

p.8

## Implementasi Mandat Penurunan Harga Gas Bumi Untuk Industri

*MASIH belum optimalnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi kembali menjadi sorotan. Perpres ini mengamanatkan penurunan harga gas bumi pada 7 industri prioritas. Adanya Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri. Untuk menekan harga gas bumi, maka perlu diuraikan struktur harga jualnya yang meliputi harga gas hulu, biaya pengelolaan infrastruktur gas, biaya niaga, dan iuran usaha. Secara umum, opsi efisiensi dapat dilakukan di seluruh pos biaya.*

## Tragedi Covid-19 Akan Menggoyang Pendapatan Negara 2020?

p.12

*VIRUS Corona Virus Disease-19 (COVID-19) diprediksi akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi China sebesar 0,3-0,4 persen. Dampak penurunan pertumbuhan ekonomi China tersebut dapat menyebabkan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.09-0,12 persen pada tahun 2020. Lesunya sektor pariwisata dan perdagangan menjadi salah satu penyebab koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata diperkirakan akan kehilangan potensi penerimaan devisa sebesar Rp54,8 triliun. Sektor perdagangan akan terdampak dengan turunnya nilai perdagangan Indonesia-China pada dua tiga bulan mendatang. Pendapatan negara dari pajak atas impor, bea masuk dan bea keluar berpotensi hilang minimal sebesar Rp7 triliun.*

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

# Problematika BUMDes Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa

oleh  
Ade Nurul Aida\*)

## Abstrak

*Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa, meningkat pula pendirian BUMDes di Indonesia. Namun dari 45.887 BUMDes yang berdiri, masih banyak pula BUMDes yang tidak beroperasi dan belum berkontribusi optimal untuk perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti pemetaan potensi dan pemilihan jenis usaha belum tepat, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), maupun dukungan pemerintah desa dan daerah (pemda) yang belum optimal. Untuk itu perlu upaya yang serius oleh pemerintah dalam menghadapi sejumlah permasalahan tersebut guna meningkatkan peran BUMDes demi memajukan ekonomi desa ke depan.*

**B**adan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan amanat UU No. 6/2014 Tentang Desa (UU Desa), yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah melalui Kemendes PDTT pun kembali menjadikan BUMDes sebagai prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT No. 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, dimana prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-

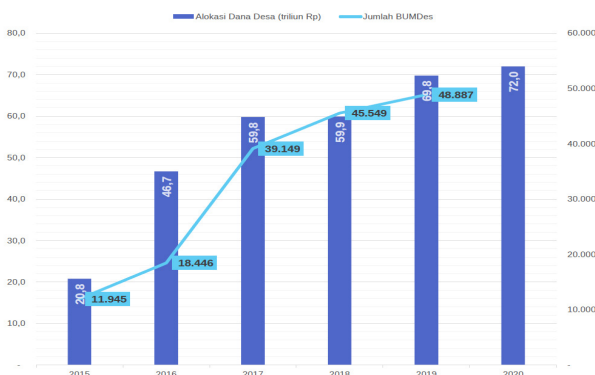
besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup meliputi pembentukan dan pengembangan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama.

Dari sini terlihat bahwa BUMDes memiliki arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi desa, bahkan BUMDes menjadi salah satu tolak ukur kemandirian dan kemajuan sebuah desa. Besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap BUMDes diwujudkan dengan memberikan alokasi Dana Desa yang selalu bertambah setiap tahunnya dengan harapan menambah jumlah BUMDes serta modal yang sedang dikembangkan BUMDes masing-masing desa.

Namun faktanya tidak demikian, bahkan ditenggarai banyak BUMDes berguguran, dan gagal tumbuh. Presiden dalam rapat terbatas soal Dana Desa pun mengatakan bahwa terdapat 2.188 BUMDes mangkrak atau tidak beroperasi, dan sekitar 1.670 BUMDes yang berjalan namun belum optimal dalam berkontribusi menggerakkan ekonomi desa (Tempo, 2019).

Untuk itu, dalam kajian ini akan dibahas apa saja yang menjadi permasalahan mangkrak dan belum optimalnya BUMDes saat ini sebagai bahan evaluasi agar peran BUMDes dalam memajukan ekonomi desa ke depan dapat terwujud.

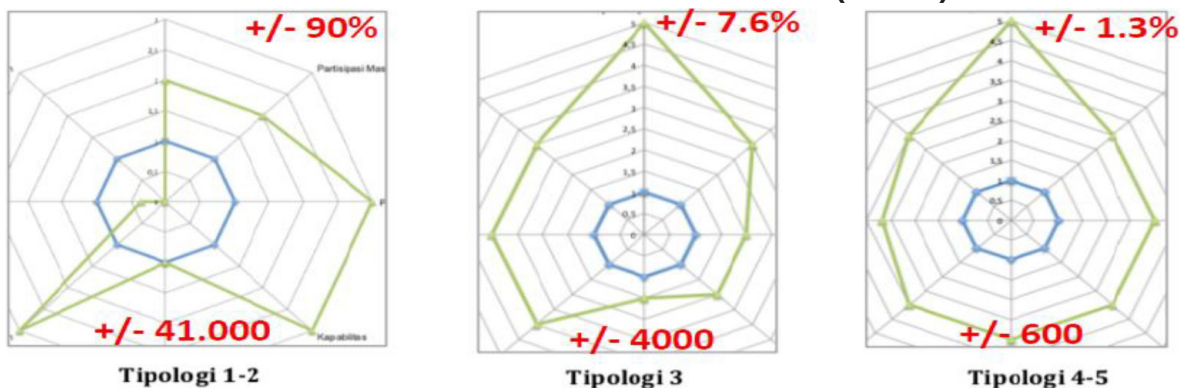
**Gambar 1. Perkembangan Alokasi Dana Desa dan Jumlah BUMDes di Indonesia**



Sumber: Nota Keuangan 2020 dan Kemendes PDTT

\*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dhena\_adhe@yahoo.com

**Gambar 2. Cek Kesehatan Usaha BUMDes (CKU-B)**



Sumber: Rudy Suryanto, 2020

Keterangan gambar: Tipologi 1-2: proses penciptaan nilai dan pondasi lembaga belum terbentuk; Tipologi 3: proses penciptaan nilai dan pondasi lembaga mulai terbentuk tetapi belum kuat; Tipologi 4-5: proses penciptaan nilai dan pondasi sudah kuat dan berkembang.

### Kondisi Terkini BUMDes

Tiap tahunnya jumlah BUMDes senantiasa mengalami peningkatan, di tahun 2014 jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 1.022 BUMDes, sementara hingga tahun 2019 sudah mencapai 45.887 BUMDes. Dimana jumlah tersebut melampaui dari target yang ditetapkan dalam RPJMN (2014-2019) yakni sebanyak 5000 BUMDes. Sayangnya dari sejumlah BUMDes yang berdiri hanya 36.607 BUMDes yang dinilai aktif beroperasi, dan sebanyak 20 persen atau 9.280 BUMDes tidak beroperasi (mangkrak).

Di sisi lain, berdasarkan data Cek Kesehatan Usaha BUMDes (CKU-B) yang dirilis oleh bumdes.id, bahwa dari jumlah BUMDes yang berdiri, sekitar 90 persen atau 41.000 BUMDes masuk dalam tipologi 1-2, sementara sekitar 7,6 persen atau 4.000 BUMDes masuk dalam tipologi 3 dan sisanya sekitar 1,3 persen atau 600 BUMDes masuk dalam tipologi 4-5 (Gambar 2)<sup>1</sup>.

Sementara berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018, hasil uji petik terhadap 8.220 BUMDes menunjukkan bahwa sebanyak 2.188 BUMDes yang didirikan tidak beroperasi dan sebanyak 1.670 BUMDes belum memberikan kontribusi

bagi pendapatan desa. Akibatnya, BUMDes belum seluruhnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa. Hal ini juga dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejak tahun 2014-2018, bahwa jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) yang salah satunya terdiri atas komponen laba BUMDes cenderung menurun, dan distribusi PADes terhadap pendapatan desa juga menurun.

Kondisi tidak beroperasi dan belum optimalnya BUMDes tersebut tentunya

**Gambar 3. Realisasi Pendapatan Asli Desa Seluruh Indonesia**



Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Desa Berbagai Tahun, BPS

1) Dari sisi usaha, tipologi 1: sudah berdiri tetapi usaha belum jalan, tipologi 2: usaha sudah jalan tetapi belum untung, tipologi 3: Usaha sudah untung tetapi belum besar, tipologi 4: omzet sudah tembus diatas 1 miliar per tahun, tipologi 5: mampu berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan warga.



tidak luput dari beragam permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi pengembangan BUMDes seperti pemetaan potensi belum tepat, keterbatasan SDM dalam pengelolaan BUMDes, serta dukungan pemerintah desa dan pemda yang belum optimal.

### **Pemetaan Potensi dan Pemilihan Jenis Usaha Belum Tepat**

Pemetaan potensi dan pemilihan jenis usaha penting sebagai pedoman dan langkah awal dalam pendirian BUMDes, karena dengan hal tersebut BUMDes yang ada tidak hanya sekedar berdiri, namun juga memiliki tujuan dan mengurangi risiko sebagai upaya pengembangan BUMDes ke depannya.

Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh BPK terhadap 8.220 BUMDes, sebanyak 547 BUMDes bidang usahanya belum sesuai dengan potensi unggulan desa dan sebanyak 871 BUMDes pembentukannya belum didukung dengan studi kelayakan. Pemetaan potensi dan pemilihan jenis usaha yang belum matang dan kurang tepat menjadi salah satu sebab dari tidak beroperasi dan belum optimalnya pendirian BUMDes yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan hasil cek kesehatan usaha BUMDes yang dilakukan oleh bumdes.id, bahwa tidak beroperasinya sebagian BUMDes dilatarbelakangi oleh kurang tepatnya pemetaan potensi desa dan pemilihan jenis usaha.

### **Terbatasnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Upaya mendirikan dan mengembangkan BUMDes tidaklah mudah, diperlukan sumber daya manusia berkualitas dan berkompeten di bidangnya agar BUMDes dapat dikelola dengan baik, sehingga memberi manfaat bagi desa dan masyarakat desa pada umumnya. Namun sayangnya, dari hasil uji petik yang dilakukan terhadap 8.220 BUMDes menunjukkan sebanyak 585 BUMDes belum didukung oleh pengelola yang kompeten. Dan keterbatasan kualitas SDM tersebut menjadi salah satu permasalahan yang menimbulkan terhambatnya perkembangan BUMDes.

Penelitian Murwadji, Rahardjo, & Hasna (2018) mengenai hambatan dalam mengembangkan BUMDes menengarai faktor minimnya pengetahuan masyarakat dalam berbisnis secara profesional melalui BUMDes. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat desa yang tidak terlalu tinggi dan kurang paham dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes (Kemenkeu, 2018). Bahkan di tingkat kepala desa, sebagai akibat dari terbatasnya kualitas SDM, masih banyak kepala desa yang tidak yakin BUMDes bisa menciptakan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Padahal kualitas SDM sangat memengaruhi kemampuan seorang terutama bagi kepala desa dalam merumuskan kebijakan ekonomi bagi desanya, terlebih setelah berlakunya UU Desa yang menempatkan seorang kepala desa pada beberapa peran baru yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan desa membangun ekonominya dengan berbasis potensi dan aset desa (Berdesa.com, 2018).

### **Dukungan Peran Pemerintah Desa dan Daerah Belum Optimal**

Salah satu instrumen dalam meningkatkan dan memajukan BUMDes yakni adanya dukungan yang kuat di desa, baik dari masyarakat, kepala desa, maupun pemerintah desa dan daerah selaku pembina dan pengawas BUMDes. Dalam UU Desa juga disebutkan bahwa dalam mengupayakan peningkatan perekonomian, baik peran pemerintah desa maupun daerah dibutuhkan bagi pengelolaan BUMDes dalam membantu meningkatkan kinerja pelaksanaan BUMDes.

Peran pemerintah desa dapat dilakukan melalui sosialisasi tentang keberadaan desa maupun pemahaman kepada masyarakat mengenai peran penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Namun faktanya, banyak masyarakat

yang tidak memahami peran penting BUMDes bahkan belum mengetahui tentang BUMDes, hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam hal tersebut masih belum cukup optimal. Sementara keterlibatan pemda juga dinilai kurang responsif dalam menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat yang ditengarai sebagai salah satu faktor lambannya perkembangan BUMDes (Yunanto dkk dalam Ghani, 2020; Kemenkeu, 2018). Koordinator Pusat

Pemberdayaan Masyarakat Universitas Jember, Hermanto Rohman (2019) juga menilai bahwa pemda kurang berperan membina desa dalam mengelola BUMDes, padahal seharusnya pemda juga melakukan pemetaan desa-desa yang dapat didorong menjadi *pilot project* percontohan BUMDes. Hasil temuan BPK dalam IHPS II Tahun 2018 juga menguatkan bahwa pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan khususnya terkait penggunaan Dana Desa dalam rangka pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

## Rekomendasi

Dengan hadirnya sejumlah permasalahan dalam pengembangan BUMDes, maka diperlukan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan peran BUMDes dalam berkontribusi bagi perekonomian desa, seperti: **pertama**, proses pemilihan dan penentuan potensi jenis usaha perlu didasarkan pertimbangan yang kuat. Musyawarah desa dapat saja membentuk tim pengkaji unit usaha dan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi desa serta menjaring informasi desa. Di samping itu, perlu melibatkan partisipasi dari masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), atau perguruan tinggi dalam penentuan jenis usaha BUMDes, sehingga terjadi keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan pembentukan badan usaha lokal. Yang tentunya hal ini dapat meningkatkan pemanfaatan badan usaha lokal tersebut. Pelibatan LSM atau perguruan tinggi dalam memetakan potensi desa telah dilakukan oleh desa Pongkok<sup>2</sup>.

**Kedua**, meningkatkan kapasitas SDM dengan menyelenggarakan pelatihan yang didanai dari Dana Desa, serta mengoptimalkan peran pendamping desa baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karena dari 75.487 desa, terdapat 4.898 pendamping yang tidak aktif, dan 4.461 desa yang tidak memiliki pendamping (BPS, 2019).

**Ketiga**, mendorong pemerintah desa maupun daerah untuk terlibat dan melakukan pembinaan dalam pengelolaan BUMDes melalui penguatan regulasi yang ada, serta turut melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki ataupun memberikan solusi dalam tiap kendala yang dialami dalam pengelolaan BUMDes.

**Keempat**, dalam meningkatkan perannya, BUMDes dapat saja melakukan penyertaan modal pada Koperasi Unit Desa (KUD) yang memiliki usaha ritel. Dengan demikian, BUMDes tidak harus membangun dan memulai usahanya dari awal. Cukup melalui kerja sama dengan KUD membuka cabang layanan di desa tersebut. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, keberlanjutan usaha lebih mungkin tercipta.

**Terakhir**, komitmen yang kuat maupun koordinasi bersama pihak yang terlibat sangat diperlukan, agar BUMDes berjalan efektif dan tujuan dapat terwujud.

2) Desa Pongkok merupakan desa yang mampu mengembangkan BUMDes dengan pemetaan potensi yang tepat. Dimana potensi air "umbul pongkok" yang dimiliki menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli desa. Bahkan di tahun 2017 pendapatan asli desa yang diterima mencapai Rp12 miliar.

## Daftar Pustaka

- Berdesa.com. 2018. Kenapa Banyak Desa Belum Mengembangkan BUMDes, Ini Sebagian Jawabannya. Diakses dari <http://www.berdesa.com/kenapa-banyak-desa-belum-mengembangkan-bumdes-ini-sebagian-jawabannya/> pada 17 Februari 2020
- BPK RI. 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018
- BPS. 2015-2019. Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2014-2018
- Ghani, Jaidi Abdul. 2020. Revitalisasi BUMDes dalam Membangun Desa. Diakses dari <http://detikindonesia.co/2020/02/11/revitalisasi-bumdes-dalam-membangun-des/> pada 25 Februari 2020
- Kemenkeu RI. 2018. Kajian Dana Desa: Analisis Empirik Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa di Indonesia
- Putra, Firdaus. 2017. Daya Ungkit Kolaborasi BUMDes dan Koperasi. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/13/085503026/daya-ungkit-kolaborasi-bumdes-dan-koperasi?page=all#source=clicktitle#source=clicktitle> pada 28 Februari 2020
- Sofyan, Ahmad. 2015. Peran Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes. Diakses dari <http://www.keuangandes.com/2015/09/peran-pemerintah-kabupaten-dan-pemerintah-des-dalam-pengelolaan-bumdes/>, pada 28 Februari 2020
- Suryanto, Rudy. 2020. Paparan Refleksi 6 Tahun UU Desa Resolusi BUMDes 2020 di sekolah BUMDes pada 15 Januari 2020
- Susilawati. 2019. Keberlanjutan BUMDes Kedepan Perlu Kajian Potensi yang Ada di Desa. Diakses dari <http://inovasidesa.pesawarankab.go.id/index.php/2019/12/17/keberlanjutan-bumdes-kedepan-perlu-kajian-potensi-yang-ada-des/> pada 17 Februari 2020
- Taufik, Amal. 2019. Mengapa Banyak BUMDes Ambyar. Diakses dari <https://www.wartabromo.com/2019/12/25/mengapa-banyak-bumdes-ambyar/> pada 24 Februari 2020
- Tempo.co. 2019. Jokowi Sebut 2.188 BUMDes Mangkrak. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1282594/jokowi-sebut-2-188-bumdes-mangkrak/full&view=ok> pada 6 Februari 2020
- Tribunbatam.id. Cara Junaidi Ubah Desa Ponggok dari Termiskin Jadi Desa Terkaya Pendapatan Rp 12 Miliar. Diakses dari <https://batam.tribunnews.com/2019/05/09/cara-junaidi-ubah-des-desa-pongok-dari-termiskin-jadi-des-terkaya-pendapatan-rp-12-miliar>, pada 26 Februari 2020
- Murwadji Tarsisius, Deden Suryo Rahardjo, Hasna. 2017. BUMDes Sebagai Badan Hukum Alternatif dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia. Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an Volume 1, Nomor 1, ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550
- bumdes.id. 2020. Cek Kesehatan Usaha. Diakses dari <https://bumdes.id/id/>

# Implementasi Mandat Penurunan Harga Gas Bumi Untuk Industri

oleh

Robby Alexander Sirait\*)

Nadya Ahda\*\*)

## Abstrak

Masih belum optimalnya implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi kembali menjadi sorotan. Perpres ini mengamanatkan penurunan harga gas bumi pada 7 industri prioritas. Adanya Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri. Untuk menekan harga gas bumi, maka perlu diuraikan struktur harga jualnya yang meliputi harga gas hulu, biaya pengelolaan infrastruktur gas, biaya niaga, dan iuran usaha. Secara umum, opsi efisiensi dapat dilakukan di seluruh pos biaya. Untuk mengakselerasikan implementasi mandat ini, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam pada pengurangan beberapa pos biaya, mendorong investasi infrastruktur jaringan gas, dan pengawasan lebih lanjut pada industri prioritas.

Pada 6 Januari 2020, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas, menyoroti pelaksanaan Perpres No. 40/2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang belum terimplementasikan dengan baik. Guna meningkatkan daya saing industri, pemerintah telah menetapkan harga gas bumi pada 7 industri prioritas industri yang memanfaatkan gas dalam proporsi yang signifikan dari biaya produksi (Tabel 1). Perpres ini berangkat dari realita masih kurang kompetitifnya sektor industri manufaktur. Hal ini salah satunya disebabkan oleh mahalnya harga energi.

Implikasi dari Perpres No. 40/2016 adalah ditekannya harga gas industri hingga USD6/mmbtu (*one million British Thermal Units*) atau setara dengan Rp83.784<sup>1</sup>. Namun hingga saat ini, mandat tersebut dinilai belum benar-benar terlaksana, melihat harga gas masih berkisar antara USD9-12/mmbtu atau sekitar Rp125.676-Rp167.568. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menganalisis perkembangan implementasi penurunan harga gas bumi beserta peluang pemerintah untuk mewujudkan harga gas yang lebih efisien.

**Tabel 1. Komponen Gas Terhadap Biaya Produksi Industri Prioritas**

Industri Prioritas	Persentase Komponen Gas
Pupuk	70
Petrokimia	70
Keramik	30-35
Kaca	30
Sarung tangan karet	30
Baja	23
Oleochemical	n/a

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber

## Struktur Harga Gas Bumi

Berbicara mengenai penurunan harga, maka perlu diuraikan struktur harga gas yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 58/2017.

**Harga Gas Hulu.** Harga gas hulu berkisar antara USD3,40–8,24/mmbtu berkontribusi hingga 70-80 persen dari harga jual, harga gas hulu sudah cukup tinggi yang disebabkan oleh biaya eksploitasi gas yang relatif mahal. Selain cenderung mahal, harga gas hulu juga berbeda-beda antarwilayah (Gambar 1). Secara umum, kompleksitas dan risiko pengembangan lapangan yang tidak bisa disamaratakan menjadi penyebab perbedaan *range* harga gas hulu antarwilayah. Sebagai contoh, gas yang

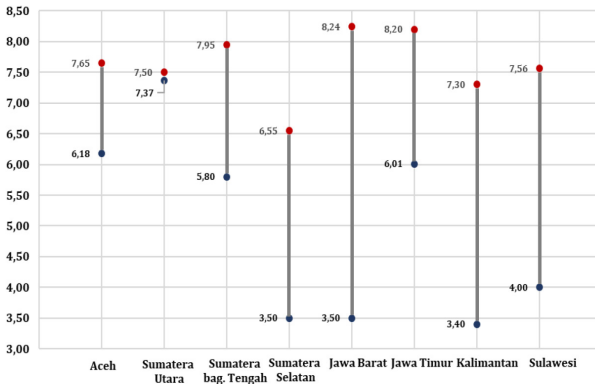
\*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: alexandersirait@gmail.com

\*\*\*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: nadya.ahda@dpr.go.id

1) Asumsi kurs USD-IDR Rp13.964,-.



**Gambar 1. Harga Gas Hulu Per Wilayah 2019 (dalam USD)**



Sumber: Kementerian ESDM

bersumber dari *onshore site* relatif lebih murah daripada *offshore*.

**Biaya Pengelolaan Infrastruktur Gas Bumi.** Berdasarkan Permen ESDM No. 58/2017, biaya pengelolaan infrastruktur gas salah satunya meliputi pembebanan biaya transmisi dan biaya distribusi gas. Hingga saat ini, biaya transmisi berkisar antara USD0,02–1,55/mmbtu, sementara biaya distribusi berkisar antara USD0,20–2,00/mmbtu. Untuk biaya distribusi, telah diatur dalam Permen tersebut bahwa maksimal komponen *Internal Rate of Return (IRR)* dari kegiatan penyaluran gas maksimal 11-12 persen. Sementara untuk biaya transmisi, diatur dalam Peraturan BPH Migas No. 8/2013, bahwa biaya transmisi ditetapkan berdasarkan *cost of service* dan keuntungan wajar (*IRR*), dengan ketentuan *IRR* harus sepadan dengan *Weighted Average Cost of Capital (WACC)* dari kegiatan usaha pengangkutan gas.

**Biaya Niaga.** Biaya niaga meliputi biaya yang dikeluarkan pada kegiatan niaga gas bumi, seperti biaya pengelolaan komoditas, biaya pemasaran, dan *margin* niaga. Dalam Permen ESDM No. 58/2017, biaya ini telah diatur maksimal 7 persen dari harga gas. Biaya niaga dalam kegiatan usaha gas bumi hingga saat ini berkisar antara USD0,24–0,58/mmbtu.

**Iuran Usaha.** Diatur dalam PP No. 48/2019 bahwa iuran usaha adalah iuran yang harus dibayarkan kepada BPH Migas sebesar perkalian antara

volume gas yang diangkut pipa dengan persentase iuran. Hingga saat ini, iuran usaha berkisar antara USD0,02–0,06/mmbtu.

## Perkembangan Implementasi

Setelah diundangkan pada tahun 2016, mandat penurunan harga gas belum sepenuhnya terlaksana. Dari 7 industri prioritas, baru 3 industri yang menikmati harga gas bumi  $\leq$  USD6/mmbtu, yaitu industri pupuk, petrokimia, dan baja. Apabila dilihat dari penggunaan gas dalam proses produksinya, ketiga industri tersebut yang memanfaatkan gas sebagai bahan baku utama. Sementara untuk 4 industri lainnya, gas dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Oleh karena itu, hal ini juga kemungkinan menjadi pertimbangan pemerintah untuk memprioritaskan 3 industri di atas.

Untuk mengakselerasikan implementasi mandat penurunan harga gas, terdapat opsi efisiensi pos biaya pada struktur harga gas diantaranya: **pertama, harga gas hulu.** Menjadi pangsa biaya terbesar, efisiensi pada pos biaya ini dinilai *feasible*. Namun di sisi lain, telah diatur pada Perpres No. 40/2016 bahwa penurunan harga gas tidak akan memengaruhi besaran penerimaan

**Tabel 2. Industri Prioritas Penerima Penurunan Harga Gas Bumi**

Industri	Harga Gas Bumi (USD/mmbtu)	Keterangan
<b>Harga sudah diturunkan</b>		
Pupuk	3,99	PT. Pupuk Kalimantan Timur 1-4
	6,00	PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang
	6,00	PT. Pupuk Iskandar Muda
	5,84	PT. Pupuk Kujang
	6,00	PT. Petrokimia Gresik
Petrokimia	4,04	PT. Kaltim Parna Industri
	3,11	PT. Kaltim Methanol Industri
Baja	4,00	PT. Panca Amara Utama
	6,00	PT. Krakatau Steel
<b>Harga belum diturunkan</b>		
Keramik	7,70	-
Kaca	7,50	-
Sarung tangan karet	9,90	-
Oleochemical	8,00-10,00	-

Sumber: Kementerian ESDM

kontraktor agar tidak menjadi disinsentif untuk eksplorasi di sektor hulu migas. Oleh karena itu, pengurangan bagian penerimaan pemerintah menjadi opsi efisiensi yang paling memungkinkan. Namun perlu menjadi catatan bahwa pengurangan porsi pemerintah harus dapat diimbangi dengan peningkatan nilai tambah dan kontribusi sektor industri yang lebih besar bagi penerimaan negara. Sebagai gambaran, Kementerian Perindustrian dan LPEM UI telah melakukan simulasi dampak fiskal dari kebijakan ini (Tabel 3). Pada hakikatnya, harga gas yang semakin rendah akan memberikan manfaat yang besar dari sektor industri, akan tetapi usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut akan semakin besar dan dinilai semakin kurang *feasible*.

Sebagai tambahan, selain opsi penurunan bagian pemerintah, sebagai salah satu badan usaha pengelolaan gas bumi, PT Pertamina (Persero) juga mengajukan dukungan pemerintah berupa insentif seperti tambahan bagian kontraktor, insentif pajak, dan relaksasi perlakuan aset negara untuk membantu menekan harga gas hulu menjadi maksimal USD4,5/mmbtu. Aspirasi seperti ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mempercepat implementasi mandat ini.

**Kedua, biaya pengelolaan infrastruktur gas bumi.** Opsi efisiensi biaya pengelolaan infrastruktur gas bumi tidak dapat lepas dari kondisi infrastruktur *midstream* gas, dalam hal ini jaringan pipa transmisi dan distribusi. Secara umum, infrastruktur gas di Indonesia masih belum mampu menjawab keseluruhan kebutuhan nasional dan cenderung belum merata. Salah satu penyebab kurang berkembangnya infrastruktur gas adalah dengan berlakunya skema *open access* pada Permen ESDM No. 19/2009, yaitu memanfaatkan jaringan pipa gas bagi semua *user*, namun dengan pengenaan biaya. Artinya, untuk berkegiatan usaha di sektor gas, pelaku usaha dapat memanfaatkan jaringan yang sudah ada tanpa harus membangun jaringan gas sendiri. Secara tidak langsung,

**Tabel 3. Simulasi Dampak Fiskal Mandat Penurunan Harga Gas Bumi**

Harga Gas Bumi (USD/mmbtu)	Penurunan Bag. Pemerintah (triliun Rp)	Peningkatan Pajak dari Industri (triliun Rp)
4	53,86	85,84
5	44,88	71,53
6	35,91	57,23

Sumber: Kementerian Perindustrian dan LPEM UI

ketetapan ini cenderung berorientasi jangka pendek tanpa memperhatikan kebutuhan jaringan gas ke depannya. Untuk saat ini, PT. PGN Tbk. sebagai *subholding* gas di Indonesia memiliki kurang lebih 10.000 km jaringan gas yang dibiayai sendiri oleh PT. PGN. Di sisi lain, pembangunan jaringan gas merupakan investasi yang besar dengan tingkat risiko tinggi dan tingkat pengembalian jangka panjang. Maka menjadi wajar apabila pengenaan tarif distribusi dan transmisi gas tinggi untuk mengompensasi keterbatasan jaringan gas dan mahalnya investasi di sektor *midstream* gas. Oleh karena itu, secara jangka panjang, ketersediaan infrastruktur gas yang masif dan merata dapat menjadi kunci efisiensi pos biaya ini.

**Ketiga, biaya niaga dan iuran usaha.** Untuk menekan biaya niaga, pemerintah telah menetapkan biaya niaga maksimal 7 persen dari harga. Apabila dalam penyaluran gas kepada konsumen melibatkan lebih dari satu badan usaha niaga, maka biaya niaga dibagi antara badan usaha niaga. Sementara untuk iuran usaha, BPH Migas menyatakan kesediaannya untuk tidak lagi memungut iuran usaha untuk menekan harga gas.

### *Rekomendasi*

Dalam akselerasi implementasi kebijakan serta mendukung efektivitasnya, pemerintah perlu mengkaji opsi efisiensi pos biaya pada struktur harga jual yang dilakukan dengan orientasi jangka panjang, antara lain dengan: **pertama**, melakukan kajian mendalam mengenai opsi penurunan penerimaan pemerintah dari pos harga gas hulu yang jelas

menggambarkan hasil besaran pengurangan dan besaran dampak terhadap peningkatan penerimaan negara ke depan. Oleh karena itu, pengawasan intensif terhadap kinerja industri terkait harus selalu dilakukan. Apabila industri tersebut tidak menunjukkan peningkatan daya saing, maka pencabutan penurunan harga gas dapat menjadi sanksi. Selain itu, pemerintah juga dapat menghimpun aspirasi dari badan usaha mengenai cara lain untuk menekan harga gas hulu.

**Kedua**, mendorong investasi pembangunan infrastruktur jaringan gas oleh pemerintah untuk mengatasi *discouragement* dari skema *open access*. Harapannya, dengan adanya insentif dari pemerintah, biaya transmisi dan distribusi dapat ditekan.

**Ketiga**, mengkaji efisiensi tata niaga gas bumi, serta kajian mengenai penghapusan iuran usaha kepada BPH Migas. Kemudian, mendorong badan usaha untuk mengalihkan iuran usaha menjadi investasi pada infrastruktur jaringan gas juga dapat menjadi opsi yang juga dapat bermanfaat untuk membantu menekan pos biaya pengelolaan infrastruktur gas.

### Daftar Pustaka

Bisnis.com. 2019. Industri Sarung Tangan Karet Khawatir Kenaikan Harga Gas Bikin Kinerja Loyo. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190926/257/1152588/industri-sarung-tangan-karet-khawatir-kenaikan-harga-gas-bikin-kinerja-loyo>.

Bisnis.com. 2020. Harga Gas US\$6 per MMBTU, Daya Saing Industri Naik? Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200215/44/1201875/harga-gas-us6-per-mmbtu-daya-saing-industri-naik->.

Bisnis.com. 2020. BPH Migas Siap Turunkan Tarif Iuran Penyaluran Gas, Tapi... Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200206/44/1198006/bph-migas-siap-turunkan-tarif-iuran-penyaluran-gas-tapi>.

DetikFinance. 2019. Biang Kerok Harga Gas Industri RI Lebih Mahal dari Malaysia. Diakses dari <https://finance.detik.com/energi/d-4772152/biang-kerok-harga-gas-industri-ri-lebih-mahal-dari-malaysia/1>.

Kontan. 2020. Pelaku Industri Menyambut Rencana Penurunan Harga Gas. Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/pelaku-industri-menyambut-rencana-penurunan-harga-gas>.

Kementerian ESDM. Bahan Kementerian ESDM Pada Rapat Kerja Bersama

Komisi VII DPR RI. 27 Januari 2020.

Kementerian ESDM. Laporan Tahunan Capaian Pembangunan 2018. Jakarta.

Peraturan BPH Migas No. 8/2013. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Permen ESDM No. 6/2016. Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi.

Permen ESDM No. 19/2009. Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.

Permen ESDM No. 58/2017. Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

PP No. 48/2019. Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Perpres No. 40/2016. Penetapan Harga Gas Bumi.

Republika. 2020. Penurunan Harga Gas, Pertamina Minta Insentif di Hulu. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q694ff423/penurunan-harga-gas-pertamina-minta-insentif-di-hulu>.

Syeirazi, M. Kholid. 2019. Rasionalisasi Harga Gas Domestik. Petroenergy. Diakses dari <https://www.petroenergy.id/article/rasionalisasi-harga-gas-domestik>.

# Tragedi Covid-19 Akan Menggoyang Pendapatan Negara 2020?

oleh

Martha Carolina\*)

Mujiburrahman\*\*)

## Abstrak

*Virus Corona Virus Disease-19 (COVID-19) diprediksi akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi China sebesar 0,3-0,4 persen. Dampak penurunan pertumbuhan ekonomi China tersebut dapat menyebabkan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,09-0,12 persen pada tahun 2020. Lesunya sektor pariwisata dan perdagangan menjadi salah satu penyebab koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata diperkirakan akan kehilangan potensi penerimaan devisa sebesar Rp54,8 triliun. Sektor perdagangan akan terkena dampak dengan turunnya nilai perdagangan Indonesia-China pada dua tiga bulan mendatang. Pendapatan negara dari pajak atas impor, bea masuk dan bea keluar berpotensi hilang minimal sebesar Rp7 triliun.*

**A**wal 2020, virus Corona menjadi momok yang sangat menakutkan bagi China dan dunia internasional. Virus tersebut menyebar cepat dengan tingkat kematian tercepat dan tertinggi setelah tragedi virus SARS dan MERS lebih satu dekade silam. Di samping jumlah korban jiwa semakin bertambah dari waktu ke waktu, ekonomi China dan dunia diprediksi akan mengalami kontraksi pada 2020. Menurut Oxford Economist, pertumbuhan ekonomi China akan tergerus menjadi 5,6 persen pada tahun 2020 (BBC, 2020). Demikian juga S&P memproyeksikan ekonomi China turun lebih jauh lagi dari semula 5,7 persen menjadi 5 persen atau turun lebih dari 1 persen bila dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2019 (Katadata, 2020).

Terkoreksinya ekonomi China akan berdampak secara signifikan bagi ekonomi dunia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Oxford Economist, pertumbuhan ekonomi global akan turun sebesar 0,2 persen. Hal ini akan berdampak signifikan ke negara-negara maju seperti Amerika dan negara-negara mitra dagang utama China lainnya termasuk Indonesia.

Sektor yang terkena dampak adalah pariwisata dan perdagangan. Jumlah kunjungan wisatawan asing (wisman) ke Indonesia telah menunjukkan pengurangan signifikan. Diprediksi neraca perdagangan Indonesia dan China juga akan mengalami penurunan.

Pertanyaan kemudian adalah sejauh mana dampak virus Corona ini pada perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor pariwisata, perdagangan dan penerimaan perpajakan pada 2020.

## Bagaimana Dampak Corona Terhadap Ekonomi Indonesia?

Pesatnya perkembangan ekonomi China dengan rata-rata pertumbuhan di atas 6 persen per tahun menjadikan China sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar dunia setelah Amerika Serikat dengan PDB mencapai USD13.602 triliun. Terkoreksinya pertumbuhan ekonomi China secara langsung akan memengaruhi perekonomian dunia. Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama China juga akan merasakan dampak koreksi pertumbuhan ekonomi China.

Direktur Pelaksana Bank Dunia, Mari Elka Pengestu menyatakan bahwa setiap

\*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: tha\_caroline03@yahoo.com

\*\*\*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: mujiburrahman8588@gmail.com



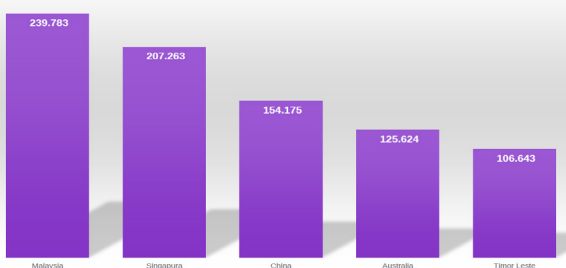
satu persen penurunan pertumbuhan ekonomi China akan menyebabkan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 persen. Bila pertumbuhan ekonomi China terkoreksi 0,3-0,4 persen maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun sebesar 0,09-0,12 persen.

Wabah virus Corona, dipastikan akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, utamanya pariwisata dan perdagangan internasional (ekspor-impor) dalam jangka pendek. Sektor manufaktur, pertambangan dan sektor lainnya diprediksi akan turut terkena dampak namun baru akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan.

### Sektor Pariwisata

Jumlah wisman ke Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kemendparekraf (2020), menunjukkan bahwa jumlah wisman pada bulan Desember 2019 mencapai 1.377.067 kunjungan. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2018. Kunjungan wisman tertinggi yaitu Malaysia, dengan 239,7 ribu kunjungan, Singapura dengan 207,3 ribu kunjungan dan China dengan 154,2 ribu kunjungan. Potensi pendapatan dari sektor tersebut sangat besar. Pada tahun 2019 potensi pendapatan dari sektor wisata mencapai USD17,8 miliar. Wisman China menopang 11,2 persen dari total kunjungan wisman pada bulan Desember 2019.

**Gambar 1. Jumlah Kunjungan Wisman Ke Indonesia Desember 2019**



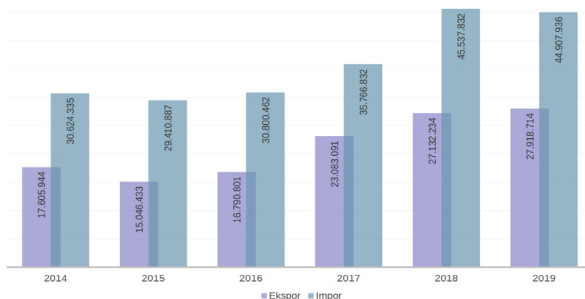
Sumber: Kemendparekraf 2020, diolah

Potensi kerugian perekonomian Indonesia dari sektor pariwisata terutama dari sisi kunjungan wisatawan China ke Indonesia sebesar 11,2 persen. Kemenparekraf (2020) menyatakan rata-rata wisman China menghabiskan uang USD168 per hari/kunjungan atau setara dengan Rp2,352 juta (kurs 14.000). Jika rata-rata 150 ribu kunjungan per bulan maka total potensi kehilangan pendapatan negara mencapai Rp362,6 miliar per bulan, belum termasuk wisman dari negara lainnya. Katakanlah jumlah wisman berkurang 50 persen maka potensi kehilangan pendapatan negara diprediksi melebihi USD9 miliar pada tahun 2020. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksi bahwa Indonesia kehilangan potensi pendapatan devisa dari sektor pariwisata akibat dampak dari virus Corona lebih dari Rp54,8 triliun (Tempo, 2020).

### Sektor Perdagangan

Neraca perdagangan Indonesia-China terus meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 2). Hingga Desember 2019, nilai total perdagangan Indonesia-China naik mencapai USD72,8 miliar atau naik 0,22 persen yoy. Nilai ekspor Indonesia naik 2,9 persen atau sebesar USD27,9 miliar. Nilai impor meskipun terkoreksi minus 1,38 persen namun masih tetap lebih tinggi dari nilai ekspor atau sebesar USD44,6 miliar. Sehingga sampai dengan Desember 2019, neraca perdagangan Indonesia-China masih minus sebesar USD16,9 miliar. Nilai ekspor Indonesia ke China hanya 16,7 persen dari total nilai ekspor Indonesia sebesar USD167,5 miliar. Sedangkan

**Gambar 2. Neraca Perdagangan Indonesia-China 2014-2019**



Sumber: BPS dan Kemendag 2020, diolah

nilai impor Indonesia dari China 26,3 persen dari nilai total impor Indonesia atau sebesar USD170,7 miliar.

Kepala BPS menyatakan bahwa hingga pekan ketiga Januari 2020, ekspor Indonesia ke China relatif belum banyak pengaruhnya. Dampak yang lebih signifikan akan terjadi pada bulan Februari dan Maret. Menurut BPS (2020), ekspor ke China mengalami penurunan USD211,9 juta jika dibandingkan dengan Desember 2019. Komoditas ekspor seperti lemak hewan nabati dan kimia organik merupakan produk yang nilai ekspornya mengalami penurunan.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh ekonom Bank Permata, Josua Pardede. Menurutnya dampak virus Corona terhadap perdagangan Indonesia-China akan terlihat signifikan di Februari dan Maret. Akan terjadi defisit transaksi berjalan kuartal I 2020. Berhentinya aktivitas pabrik-pabrik otomotif di Wuhan menyebabkan permintaan besi dan baja dari Indonesia akan menurun tajam (Detikcom,2020). Selain besi dan baja, ekspor batu bara Indonesia akan terkoreksi dengan tajam. Karena komoditas batu bara masih menjadi bahan baku utama dari industri China secara keseluruhan. Neraca perdagangan Indonesia juga akan mengalami surplus pada Januari 2020 sebesar USD67 juta. Kinerja ekspor diprediksi berkontraksi minus 4,4 persen atau melambat minus 0,7 persen yoy karena faktor turunnya harga dan volume ekspor secara bersamaan. Perlambatan laju ekspor juga dipengaruhi oleh kontraksi harga komoditas. Harga CPO diperkirakan turun sebesar minus 11,54 persen, karet juga mengalami penurunan harga minus 4,89 persen sedangkan harga batu bara akan naik tipis 1,18 persen.

Demikian juga impor akan terkoreksi minus 5,1 persen atau turun minus 8,2 persen yoy. Hal ini diakibatkan oleh penurunan harga minyak sebesar 15,56 persen sehingga mendorong penurunan impor migas. Penurunan impor juga didorong oleh penurunan impor non migas akibat industri manufaktur di Indonesia masih berkontraksi karena

**Tabel 1. Potensi Kehilangan Pendapatan Negara Akibat Virus Corona (dalam miliar Rp)**

	10 Persen	50 Persen	100 Persen
Bea Keluar	55,84	279,2	558,4
Bea Masuk	973,7	4.868,5	9.737
Pajak Atas Impor	5.970,64	29.853,2	59.706,4
PPH 22 Impor	1.395,16	6.975,8	13.951,6
PPN Impor	4.452,5	22.262,5	44.525
PPnBM Impor	122,98	614,9	1.229,8
Total	7.000,18	35.000,9	70.001,8

Catatan: 10 persen; 50 persen; dan 100 persen adalah persentase besaran dampak

impor bahan baku dan barang modal belum maksimal karena masih awal tahun (Detikcom,2020).

### Bagaimana Penerimaan Perpajakan?

Dampak terkoreksinya pertumbuhan ekonomi China akibat virus Corona menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi yang pada akhirnya akan memengaruhi penerimaan negara 2020.

Berdasarkan data realisasi bea keluar, bea masuk dan pajak atas impor pada tahun 2019 lalu, penulis melakukan perhitungan sederhana terkait potensi penerimaan negara yang hilang dari ekspor-impor RI-China. Perhitungan sederhana ini mengasumsikan bahwa virus Corona terus berlanjut dan belum mereda hingga di penghujung 2020. Sehingga berdampak pada bea keluar, bea masuk dan pajak atas impor. Perhitungan potensi kehilangan bea keluar didapat dari nilai total ekspor RI dibagi dengan nilai ekspor RI ke China lalu dikali dengan besaran realisasi penerimaan bea keluar pada tahun 2019. Sedangkan untuk bea masuk dan pajak atas impor didapat dari nilai total impor RI dibagi dengan nilai impor RI atas China lalu dikalikan dengan besaran penerimaan masing-masing baik bea masuk dan pajak atas impor pada 2019. Selanjutnya penulis membagi potensi kehilangan penerimaan negara dalam kategori 100 persen; 50 persen dan 10 persen.

Bila dampak virus Corona ini sepersepuluh dari realisasi penerimaan

bea keluar, bea masuk dan pajak atas impor, maka diprediksi penerimaan negara hilang Rp7 triliun pada 2020 hanya dari China saja. Tidak menutup kemungkinan dampak virus Corona tersebut akan meluas hingga ke negara-negara lain sehingga potensi kerugian negara akan lebih besar dari hitungan sederhana di atas.

## *Rekomendasi*

Hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam meredam dampak virus Corona dalam upaya perolehan pendapatan diantaranya: **pertama**, pemerintah harus bekerja keras mencari mitra dagang selain China untuk meminimalisir potensi kehilangan penerimaan negara di sektor perdagangan. **Kedua**, pemerintah harus mencari cara untuk mengatasi dampak yang lebih jauh pada sektor lain terutama sektor manufaktur yang diprediksi kehilangan potensi pendapatan negara jauh lebih besar.

## Daftar Pustaka

Antarnews. 2020. Waspada Dampak Virus Corona Pada Perdagangan RI-China. Diakses dari <https://www.antarnews.com/berita/1301578/bps-waspada-dampak-virus-corona-pada-perdagangan-ri-china> tanggal 20 Februari 2020.

BBC Indonesia. 2020. Dampak virus corona bagi Indonesia: 'Sepi turis hingga berpotensi gerus nilai ekspor'. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51369660> tanggal 12 Februari 2020.

Detikcom. 2020. Ekspor Ke China Turun Imbas Corona Ekonomi RI Bisa Merana. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4894485/ekspor-ke-china-turun-imb-asa-corona-ekonomi-ri-bisa-merana> tanggal 19 Februari 2020.

Detikcom. 2020. Virus Corona Hantui Perdagangan RI dan China. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4901882/virus-corona-hantui->

[perdagangan-ri-dan-china](https://www.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4901882/virus-corona-hantui-perdagangan-ri-dan-china) tanggal 20 Februari 2020.

Katadata. 2020. Dampak Virus Corona SP Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2020/02/07/dampak-virus-corona-sp-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-tiongkok> tanggal 19 Februari 2020.

Katadata. 2020. Korban Tewas Virus Corona Tembus 2000 Uji Coba Vaksin Butuh 18 Bulan. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2020/02/19/korban-tewas-virus-corona-tembus-2000-uji-coba-vaksin-butuh-18-bulan> tanggal 20 Februari 2020.

Katadata. 2020. Berapa Pendapatan Devisa dari Sektor Pariwisata Indonesia. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/10/berapa-pendapatan-devisa-dari-sektor-pariwisata-indonesia> tanggal 20 Februari 2020.

Kemenkeu. 2020. APBN Kita Januari 2020. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn-kita>

Kemenparekraf. 2020. Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2019.

Kemenparekraf. 2020. Laporan Akhir Kajian Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia. LPEM FE UI

Kementerian Perdagangan. 2020. Statistik Perdagangan Indonesia. Diakses dari <http://statistik.kemendag.go.id/publication/monthly-trade-figure> tanggal 11 Februari 2020.

Tempo. 2020. Virus Corona, Whisnutama: Kerugian Devisa Pariwisata Capai 548 T. Diakses dari: <https://bisnis.tempo.co/read/1303758/virus-corona-wishnutama-kerugian-devisa-pariwisata-capai-548-t> tanggal 20 Februari 2020.

World Health Organization. 2020. Data dan Informasi Perkembangan Virus Corona Per 1 Maret 2020. Diakses dari <https://experience.arcgis.com/> tanggal 2 Maret 2020.

*"Siap Memberikan  
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional"*

**Buletin APBN**  
**Pusat Kajian Anggaran**  
**Badan Keahlian DPR RI**  
[www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)  
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635



9 772502 868006